

Pengaruh Luas Wilayah, Populasi Penduduk, Rasio Efisiensi Terhadap Financial Distress di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Periode 2020 - 2024

Rizqi Darma Saputra, Banu Witono

Universitas Muhammadiyah Surakarta

b200220213@student.ums.ac.id, bw257@ums.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of regional area size, population, and efficiency ratio on financial distress in local governments of Central Java Province during the 2020–2024 period. Financial distress in the public sector reflects the inability of local governments to manage public finances sustainably, which may reduce the quality of public services. This research employs a quantitative approach using a causal method. The research sample consists of 35 local governments, including 29 regencies and 6 municipalities in Central Java Province. Binary logistic regression is applied to examine the influence of independent variables on financial distress. The results indicate that regional area size has a significant effect on financial distress, population has a significant effect on financial distress, and the efficiency ratio has a significant effect on financial distress. These findings suggest that geographic characteristics, demographic conditions, and financial management efficiency are crucial determinants of local government financial conditions. This study is expected to provide insights for local governments in formulating more effective and sustainable financial management policies to reduce the risk of financial distress.

Keywords: *financial distress, regional area size, population, efficiency ratio, local government*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh luas wilayah, populasi penduduk, dan rasio efisiensi terhadap kondisi *financial distress* pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah periode 2020–2024. *Financial distress* pada sektor publik mencerminkan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara berkelanjutan sehingga berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kausal. Data penelitian diperoleh dari 35 pemerintah daerah yang terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi logistik biner untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap *financial distress*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas wilayah berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*, populasi penduduk berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*, serta rasio efisiensi berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Temuan ini mengindikasikan bahwa karakteristik geografis, demografis, dan efisiensi pengelolaan keuangan merupakan faktor penting yang memengaruhi kondisi keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi

pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan berkelanjutan guna meminimalkan risiko *financial distress*.

Kata kunci: *financial distress*, luas wilayah, populasi penduduk, rasio efisiensi, pemerintah daerah

PENDAHULUAN

Financial distress pada sektor publik diartikan sebagai ketidakmampuan Pemerintah Daerah dalam menyediakan pelayanan kepada publik sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan (Pranoto et al., 2022). Salah satu standar mutu pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap Pemerintah Daerah adalah alokasi belanja modal. Hasil penelitian yang dilakukan oleh seknas Forum Indonesia untuk Transparansi (FITRA), didapatkan bahwa tren belanja modal terhadap belanja daerah kabupaten/kota masih di bawah ketentuan regulasi belanja modal yang disyaratkan. Belanja modal yang rendah akan berpengaruh terhadap rendahnya pembangunan infrastruktur dan perawatan infrastruktur yang membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak memadai mengindikasikan sehingga bahwa kondisi ini Pemerintah Daerah berpotensi untuk mengalami financial distress. Menurut Pranoto et al., (2022) bahwa pada Pemerintah Daerah, financial distress ditandai dengan tidak terkendalinya pengeluaran yang dilakukan untuk belanja operasional atau belanja rutin, sehingga Pemerintah Daerah menekan pengeluaran untuk belanja modal atau belanja investasi.

Financial distress pada Pemerintah Daerah mengancam kemampuan Pemerintah Daerah untuk melayani masyarakat dan mempertahankan fungsi-fungsi publik yang penting. Jadi, financial distress dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana pemerintah tidak mengoptimalkan alokasi belanja modal dalam membangun infrastruktur publik sehingga akan berdampak pada tingkat pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat maka hal tersebut yang menyebabkan mengalami kondisi financial distress.

Berdasarkan informasi yang dipublikasikan oleh Dirjen Dana Perimbangan mengenai potret APBD tahun 2017 (Republika.co.id) komposisi belanja modal kabupaten dan kota di Indonesia masih dibawah persyaratan yang ditetapkan oleh permendagri dan hasil penelitian seknas Forum Indonesia untuk Transparansi (FITRA), (Seknasfitra.org.id) didapatkan bahwa tren belanja modal terhadap belanja daerah kabupaten / kota masih dibawah ketentuan – ketentuan regulasi belanja modal. Belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relative kurang produktif. Pemerintah pusat mensyaratkan belanja modal daerah yang optimal adalah 30% dari total belanja daerah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Jika fenomena – fenomena tersebut berlanjut maka akan mengakibatkan Pemerintah Daerah mengalami kondisi financial distress sehingga tidak akan mampu memberikan pelayanan yang memadai untuk masyarakat yang berdampak terhadap tujuan pemerintah yang tidak akan tercapai. M. Sari & Arza, (2019) menekankan hal yang menyebabkan kondisi financial distress yaitu ketidakmampuan pemerintah untuk beradaptasi dengan penurunan ekonomi

khususnya Ketika beberapa tanggung jawab dialihkan dari pusat ke kabupaten atau kota.

Tabel 1.1 Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

Kategori KFD	2020	2021	2022	2023	2024
Sangat Rendah	9	9	8	3	2
Rendah	8	8	7	13	16
Sedang	8	9	9	13	12
Tinggi	5	5	3	5	5
Sangat Tinggi	4	3	7	4	3
Jumlah Provinsi	34	34	34	38	38

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Berdasarkan data tabel Peta KFD (Kondisi Financial Distress) Provinsi periode 2020-2024, terlihat adanya dinamika yang signifikan dalam perkembangan kondisi keuangan pemerintah provinsi di Indonesia selama lima tahun terakhir. Pada kategori KFD sangat rendah, terjadi penurunan yang sangat drastis dari 9 provinsi pada tahun 2020 menjadi 9 provinsi pada tahun 2021, kemudian turun menjadi 8 provinsi pada tahun 2022, menurun tajam menjadi 3 provinsi pada tahun 2023, dan mencapai titik terendah dengan hanya 2 provinsi pada tahun 2024. Sebaliknya, kategori KFD rendah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dimulai dari 8 provinsi pada tahun 2020, bertahan di 8 provinsi pada tahun 2021, sedikit turun menjadi 7 provinsi pada tahun 2022, kemudian melonjak signifikan menjadi 13 provinsi pada tahun 2023, dan mencapai puncaknya dengan 16 provinsi pada tahun 2024. Kategori KFD sedang mengalami fluktuasi yang cukup menarik, dimulai dari 8 provinsi pada tahun 2020, meningkat menjadi 9 provinsi pada tahun 2021 dan 2022, kemudian naik menjadi 13 provinsi pada tahun 2023, dan sedikit turun menjadi 12 provinsi pada tahun 2024. Untuk kategori KFD tinggi, kondisinya relatif stabil dengan 5 provinsi pada tahun 2020 dan 2021, menurun menjadi 3 provinsi pada tahun 2022, kembali naik menjadi 5 provinsi pada tahun 2023 dan 2024. Sementara itu, kategori KFD sangat tinggi menunjukkan pola yang berfluktuasi, dimulai dari 4 provinsi pada tahun 2020, turun menjadi 3 provinsi pada tahun 2021, mencapai puncaknya dengan 7 provinsi pada tahun 2022, kemudian turun menjadi 4 provinsi pada tahun 2023, dan kembali turun menjadi 3 provinsi pada tahun 2024. Total jumlah provinsi juga mengalami peningkatan dari 34 provinsi pada periode 2020-2022 menjadi 38 provinsi pada periode 2023-2024, yang menunjukkan adanya pemekaran wilayah administratif. Pola perubahan kondisi financial distress ini mengindikasikan adanya pergeseran yang mengkhawatirkan dalam lanskap keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. Fenomena migrasi dari kategori sangat rendah menuju kategori rendah dan sedang menunjukkan bahwa semakin sedikit provinsi yang memiliki kondisi keuangan yang sangat sehat, sementara semakin banyak provinsi yang menghadapi tekanan keuangan dalam tingkat tertentu.

Kondisi ini mencerminkan kompleksitas tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural maupun operasional. Dalam konteks penelitian ini, fenomena tersebut menjadi landasan empiris yang kuat untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor geografis, demografis, dan efisiensi keuangan terhadap kondisi financial distress pemerintah daerah. Menurut D. N. Sari & Murtanto, (2024) faktor – factor yang menyebabkan terjadi financial distress di pemerintah daerah yaitu luas wilayah, populasi penduduk, dan rasio efisiensi. Luas wilayah sebagai variabel geografis mencerminkan kompleksitas teritorial yang harus dilayani oleh pemerintah daerah, yang berimplikasi pada kebutuhan infrastruktur, distribusi pelayanan publik, dan alokasi anggaran pembangunan. Populasi penduduk sebagai variabel demografis menggambarkan tingkat kebutuhan layanan publik yang harus dipenuhi dan menjadi basis perhitungan berbagai program pemerintah, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur sosial. Adapun rasio efisiensi sebagai variabel keuangan merepresentasikan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas. Analisis terhadap interaksi ketiga variabel ini dalam mempengaruhi financial distress menjadi sangat relevan untuk dipahami, khususnya dalam konteks Provinsi Jawa Tengah yang memiliki karakteristik geografis dan demografis yang heterogen di antara 35 kabupaten/kota yang menjadi bagian wilayah administratifnya.

Luas wilayah merupakan area geografis suatu daerah beserta segala komponen yang terkait dengan batas dan system yang berlaku, yang ditentukan berdasarkan aspek administrative dan fungsional. Daerah dengan wilayah yang luas memerlukan biaya pembangunan yang signifikan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan wilayahnya. D. N. Sari & Murtanto, (2024) menjelaskan bahwa luas wilayah mencerminkan cakupan layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Wilayah yang lebih luas umumnya memiliki sumber daya alam yang lebih banyak untuk dikelola guna menghasilkan PAD yang dapat membiayai operasional pemerintahan. Tetapi, pemerintah daerah yang wilayahnya lebih luas maka probabilitas untuk mengalami financial distress juga akan lebih besar karena pelayanan atau pembangunan yang harus dilakukan juga akan lebih besar dibandingkan daerah yang wilayahnya lebih kecil. Menurut penelitian M. Sari & Arza, (2019) bahwa luas wilayah berpengaruh positif terhadap financial distress yang dialami pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Wulandari & Arza, (2020) menjelaskan bahwa semakin luas wilayah tersebut maka semakin besar kebutuhan akan pelayanan dari masyarakat. Berdasarkan hal tersebut luas wilayah berpengaruh positif terhadap financial distress. Sedangkan penelitian yang dilakukan Zakia & Setiawan, (2021) menyatakan bahwa daerah yang memiliki luas wilayah yang besar akan membutuhkan sarana dan prasarananya semakin banyak, luas wilayah dapat menggambarkan tindakan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan

public kepada masing – masing daerah. Hal tersebut menunjukkan luas wilayah berpengaruh positif terhadap financial distress.

Populasi setiap kabupaten dan kota memiliki pengaruh terhadap peningkatan belanja daerah. Sebagaimana dijelaskan oleh D. N. Sari & Murtanto, (2024), jumlah penduduk mengacu pada kuantitas manusia yang bermukim di suatu wilayah, yang memiliki kewajiban mematuhi regulasi lokal dan berhak menerima layanan publik untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Semakin besar jumlah penduduk akan semakin besar tingkat pelayanan public yang harus diberikan dan akan banyak tuntutan hak kepada pemerintah daerah. Menurut penelitian Zakia & Setiawan, (2021) menyatakan populasi penduduk berpengaruh positif terhadap financial distress. Hal ini sejalan dengan penelitian Wulandari & Arza, (2020) bahwa masyarakat yang menetap pada sebuah daerah, memiliki hak mendapatkan pelayanan public sehingga memperoleh kesejahteraan. Hal tersebut menunjukkan bahwa populasi penduduk berpengaruh positif terhadap financial distress. Penelitian yang lain Elfiyana & Arza, (2022) menyatakan bahwa populasi penduduk merupakan sebuah pengukuran dari kompleksnya suatu daerah yang berarti semakin meningkatnya jumlah penduduk maka tuntutan atas pelayanan public oleh masyarakat juga akan meningkat karena masyarakat memiliki peran penting sebagai pengawas dari kinerja pemerintah yang dirasakan melalui optimalisasi belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa populasi penduduk berpengaruh positif terhadap financial distress.

Rasio efisiensi pada entitas pemerintahan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran dan sumber daya dalam penyediaan layanan publik. Efisiensi pengelolaan keuangan merupakan komponen penting dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks sektor publik, efisiensi merujuk pada kemampuan pemerintah mengoptimalkan sumber daya terbatas untuk mencapai hasil maksimal. Pemerintah yang tidak efisien dalam alokasi belanja cenderung mengalami tekanan fiskal, terutama ketika PAD tidak mencukupi untuk menutupi beban operasional. Mengingat pentingnya efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik, kajian mengenai dampak rasio efisiensi terhadap kesulitan keuangan dalam lingkup pemerintahan menjadi sangat relevan. Hasil kajian ini diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan tata kelola keuangan publik yang lebih akuntabel dan berkelanjutan. Menurut penelitian (Lailiyah & Desitama, (2024) menyatakan bahwa semakin tinggi angka rasio mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mempunyai jumlah pengeluaran modal yang lebih tinggi terhadap pendapatan operasional atau jumlah pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa rasio efisiensi berpengaruh positif terhadap financial distress. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Pradana & Sarjiyanto, (2023) menyatakan bahwa semakin tinggi rasio efisiensi, semakin buruk kinerja pemerintah daerah karena tidak efisien dalam mengalokasikan pendapatan yang ada untuk dibelanjakan, yang akan menyebabkan kekurangan dana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa rasio efisiensi berpengaruh positif terhadap financial distress. Menurut peneliti lain D. N. Sari & Murtanto, (2024) menyatakan bahwa rasio efisiensi

terkait erat dengan aktivitas operasional pemerintah daerah dalam satu periode waktu. Jadi dapat disimpulkan bahwa rasio efisiensi berpengaruh positif terhadap financial distress.

Lebih jauh lagi, studi yang menganalisis pengaruh faktor geografis (luas wilayah) dan demografis (populasi penduduk) secara bersamaan dengan faktor keuangan (rasio efisiensi) terhadap financial distress pemerintah daerah masih sangat jarang dilakukan. Kesenjangan ini menjadi semakin relevan dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman geografis dan demografis antar daerah yang sangat besar, khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis faktor geografis (luas wilayah), demografis (populasi penduduk), dan keuangan (rasio efisiensi) mempengaruhi kondisi financial distress di pemerintah daerah, dengan fokus khusus pada Provinsi Jawa Tengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif kausal. Menurut Haraqi & Ningsih, (2017), pendekatan kuantitatif kausal merupakan pendekatan dalam penelitian yang mencari hubungan antar satu variabel dengan variabel lain yang memiliki sebab akibat. Penelitian ini menguji hipotesis yang ditetapkan dan untuk mencari pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Pada penelitian ini, variabel independen (yang memengaruhi) mencakup luas wilayah, populasi penduduk, dan rasio efisiensi, sedangkan variabel dependen (yang dipengaruhi) adalah financial distress. Penelitian ini menggunakan 35 pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah sebagai unit analisis, yang terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Luas Wilayah Terhadap Financial Distress Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan hasil uji Wald pada model regresi logistik biner, variabel luas wilayah memiliki nilai signifikansi ($0,001 < 0,05$) dan nilai odds ratio sebesar 3,268. Hal ini menunjukkan luas wilayah berpengaruh signifikan terhadap financial distress.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui Teori Ketergantungan Sumber Daya yang menyatakan bahwa suatu organisasi, termasuk pemerintah daerah, sangat bergantung pada ketersediaan dan kemampuan pengelolaan sumber daya untuk mempertahankan keberlangsungan operasionalnya. Dalam konteks pemerintahan daerah, luas wilayah merepresentasikan besarnya ruang pelayanan publik, cakupan administrasi, serta kompleksitas pengelolaan sumber daya yang harus ditangani oleh pemerintah daerah.

Daerah dengan wilayah yang lebih luas cenderung menghadapi kebutuhan sumber daya yang lebih besar, terutama untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, penyediaan layanan publik, serta pengawasan wilayah. Kondisi ini menuntut alokasi anggaran yang tinggi dan berkelanjutan. Apabila kebutuhan tersebut tidak diimbangi dengan kapasitas fiskal yang memadai, seperti pendapatan

daerah yang cukup atau pengelolaan keuangan yang efisien, maka pemerintah daerah akan semakin bergantung pada sumber daya eksternal, seperti dana transfer dari pemerintah pusat.

Menurut Teori Ketergantungan Sumber Daya, tingginya ketergantungan pada pihak eksternal meningkatkan kerentanan organisasi terhadap tekanan keuangan. Dalam hal ini, pemerintah daerah dengan wilayah yang luas namun memiliki keterbatasan dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya internal akan lebih rentan mengalami financial distress. Hal ini terjadi karena sebagian besar anggaran daerah terserap untuk memenuhi kebutuhan dasar pelayanan wilayah, sehingga ruang fiskal untuk belanja produktif dan pembangunan jangka panjang menjadi semakin terbatas.

Nilai odds ratio sebesar 3,268 memperkuat argumentasi teoretis tersebut, karena menunjukkan bahwa luas wilayah bukan sekadar karakteristik geografis, melainkan faktor struktural yang secara nyata meningkatkan risiko financial distress apabila tidak diimbangi dengan kemampuan pengelolaan sumber daya yang efektif. Dengan kata lain, semakin luas wilayah suatu daerah, semakin besar tuntutan terhadap sumber daya, dan semakin tinggi pula potensi tekanan keuangan yang dihadapi pemerintah daerah.

Dengan demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Ketergantungan Sumber Daya, yang menegaskan bahwa kondisi financial distress pada pemerintah daerah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor keuangan semata, tetapi juga oleh karakteristik struktural seperti luas wilayah yang menentukan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber daya eksternal. Temuan ini mengindikasikan bahwa upaya pengendalian financial distress pada daerah dengan wilayah luas perlu difokuskan pada peningkatan kapasitas fiskal dan pengelolaan sumber daya secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Menurut penelitian Wulandari & Arza, (2020) menunjukkan bahwa luas wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial distress. Semakin luas wilayah suatu kabupaten/kota, semakin besar kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana serta biaya pelayanan publik, sehingga meningkatkan tekanan fiskal dan risiko terjadinya financial distress apabila tidak diimbangi dengan alokasi belanja modal yang memadai. Penelitian Zakia & Setiawan, (2021) juga menyatakan luas wilayah berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Semakin luas wilayah suatu pemerintah daerah, semakin besar kebutuhan pembiayaan infrastruktur dan pelayanan publik, sehingga meningkatkan tekanan fiskal dan berpotensi mendorong terjadinya financial distress apabila tidak diimbangi dengan kapasitas. Penelitian Rahmi & Sari, (2023) juga menyatakan bahwa luas wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial distress. Semakin luas wilayah suatu kabupaten/kota, semakin besar kebutuhan pembiayaan pelayanan publik dan infrastruktur, sehingga meningkatkan tekanan fiskal dan risiko terjadinya financial distress apabila tidak diimbangi dengan kapasitas keuangan daerah yang memadai. Tetapi hasil penelitian lainnya menurut D. N. Sari & Murtanto, (2024) menyatakan bahwa luas wilayah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap financial distress. Kondisi ini dijelaskan

melalui kemampuan daerah yang memiliki wilayah luas untuk mengoptimalkan sumber daya alam dan potensi ekonomi, sehingga kapasitas fiskal meningkat dan risiko tekanan keuangan dapat ditekan. Penelitian lainnya menurut M. Sari & Arza, (2019) juga menyatakan luas wilayah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap financial distress. Artinya, pemerintah daerah dengan wilayah yang lebih luas cenderung memiliki risiko financial distress yang lebih rendah karena belanja modal dialokasikan sesuai kebutuhan sarana dan prasarana daerah, sehingga mampu mendukung pelayanan publik secara lebih optimal.

Dengan demikian, hasil penelitian ini **mendukung hipotesis pertama (H1)**, yang mengindikasikan bahwa luas wilayah berpengaruh signifikan terhadap financial distress pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah periode 2020–2024.

Pengaruh Populasi Penduduk Terhadap Financial Distress Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan hasil uji Wald pada model regresi logistik biner, variabel populasi penduduk memiliki nilai signifikansi ($0,001 < 0,05$) dan nilai odds ratio sebesar 0,115. Hal ini menunjukkan populasi penduduk berpengaruh signifikan terhadap financial distress.

Dalam kerangka Teori Ketergantungan Sumber Daya, populasi penduduk tidak dipahami sebagai beban struktural, melainkan sebagai aset ekonomi dan fiskal yang dapat memperkuat keberlanjutan organisasi pemerintah daerah. Teori ini menekankan bahwa organisasi yang memiliki sumber daya internal yang memadai akan memiliki tingkat ketergantungan yang lebih rendah terhadap sumber daya eksternal. Dalam konteks ini, penduduk berperan sebagai sumber daya yang dapat dimobilisasi untuk menghasilkan pendapatan dan mendukung aktivitas ekonomi daerah.

Populasi penduduk yang besar memperluas basis penerimaan daerah, khususnya melalui pajak daerah, retribusi, serta kontribusi tidak langsung dari aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi ini memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk membiayai belanja operasional dan pelayanan publik tanpa harus sepenuhnya bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah daerah dengan populasi penduduk yang besar cenderung memiliki ketahanan fiskal yang lebih baik.

Berbeda dengan variabel luas wilayah yang menekankan aspek kebutuhan dan beban pelayanan, populasi penduduk lebih menonjolkan kapasitas ekonomi dan potensi pendapatan. Dalam perspektif Teori Ketergantungan Sumber Daya, keberadaan penduduk yang besar justru mengurangi tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber pendanaan eksternal, sehingga risiko tekanan keuangan dapat ditekan. Hal inilah yang menjelaskan mengapa populasi penduduk memiliki hubungan negatif dengan financial distress.

Nilai odds ratio sebesar 0,115 menunjukkan bahwa populasi penduduk berfungsi sebagai faktor penyangga (buffer) terhadap financial distress. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula potensi sumber daya internal yang dapat

dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas keuangan. Dengan berkurangnya ketergantungan terhadap pihak eksternal, pemerintah daerah menjadi lebih resilien terhadap tekanan fiskal dan risiko financial distress.

Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung Teori Ketergantungan Sumber Daya, yang menegaskan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya internal dalam hal ini populasi penduduk memiliki peran penting dalam menurunkan risiko financial distress. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas ekonomi masyarakat dan optimalisasi potensi penduduk merupakan strategi penting dalam menjaga keberlanjutan keuangan pemerintah daerah.

Menurut penelitian Pranoto et al., (2022) populasi penduduk berpengaruh positif terhadap financial distress. Jumlah penduduk yang besar meningkatkan kebutuhan belanja operasional dan pelayanan publik, seperti belanja pegawai dan belanja sosial, sehingga pemerintah daerah cenderung menekan belanja modal dan berpotensi mengalami financial distress apabila pengelolaan keuangannya tidak efektif. Penelitian M. Sari & Arza, (2019) Populasi penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial distress, yang menunjukkan bahwa semakin besar jumlah penduduk, semakin tinggi probabilitas pemerintah daerah mengalami financial distress. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya tuntutan pelayanan publik dan kebutuhan belanja daerah yang harus dipenuhi seiring bertambahnya jumlah penduduk. Menurut penelitian D. N. Sari & Murtanto, (2024) populasi penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap financial distress. Artinya, peningkatan jumlah penduduk menurunkan peluang pemerintah daerah mengalami financial distress. Hal ini disebabkan karena populasi penduduk mencerminkan sumber daya manusia dan basis penerimaan daerah, seperti pajak dan retribusi, yang mampu meningkatkan kapasitas fiskal dan mengurangi ketergantungan pada sumber pendanaan eksternal. Penelitian Wulandari & Arza, (2020) Populasi penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap financial distress. Jumlah penduduk yang besar mencerminkan potensi sumber daya ekonomi dan basis pendapatan daerah yang lebih luas melalui pajak dan retribusi, sehingga dapat meningkatkan kapasitas fiskal dan menurunkan kemungkinan pemerintah daerah mengalami financial distress. Penelitian Pradana & Sarjiyanto, (2023) populasi penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap financial distress. Jumlah penduduk yang besar mencerminkan ketersediaan sumber daya ekonomi dan basis penerimaan daerah yang lebih luas, sehingga mampu meningkatkan kapasitas fiskal dan menurunkan risiko terjadinya financial distress. Penelitian Elfiyana & Arza, (2022) populasi penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap financial distress. Jumlah penduduk yang besar mencerminkan ketersediaan sumber daya ekonomi dan basis penerimaan daerah yang lebih luas, sehingga mampu meningkatkan kapasitas fiskal dan menurunkan risiko terjadinya financial distress.

Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua (H2), yang mengindikasikan bahwa populasi penduduk berpengaruh signifikan terhadap

financial distress pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah periode 2020–2024.

Pengaruh Rasio Efisiensi Terhadap Financial Distress Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan hasil uji Wald pada model regresi logistik biner, variabel rasio efisiensi memiliki nilai signifikansi ($0,029 < 0,05$) dan nilai odds ratio sebesar 59,436. Hal ini menunjukkan rasio efisiensi berpengaruh signifikan terhadap financial distress.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui Teori Ketergantungan Sumber Daya yang menyatakan bahwa keberlangsungan organisasi sangat bergantung pada kemampuan organisasi dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya. Dalam konteks pemerintah daerah, sumber daya utama yang dikelola adalah sumber daya keuangan, yang tercermin dalam hubungan antara pendapatan dan belanja daerah.

Rasio efisiensi menggambarkan tingkat keseimbangan antara realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan daerah. Rasio efisiensi yang tinggi menunjukkan bahwa belanja daerah relatif lebih besar dibandingkan pendapatan yang diperoleh. Kondisi ini mencerminkan ketidakefisienan pengelolaan keuangan daerah, karena pemerintah daerah mengeluarkan sumber daya keuangan melebihi kemampuan pendapatan yang dimilikinya. Dalam perspektif Teori Ketergantungan Sumber Daya, ketidakseimbangan ini menyebabkan pemerintah daerah semakin bergantung pada sumber daya eksternal, seperti transfer dari pemerintah pusat atau sumber pembiayaan lainnya.

Ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya eksternal meningkatkan kerentanan organisasi terhadap tekanan keuangan, karena pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang semakin sempit dan fleksibilitas anggaran yang terbatas. Ketika sebagian besar pendapatan habis untuk membiayai belanja rutin dan operasional, pemerintah daerah akan kesulitan untuk mengalokasikan anggaran bagi belanja produktif dan pembangunan jangka panjang. Kondisi inilah yang secara langsung mendorong terjadinya financial distress.

Nilai odds ratio sebesar 59,436 memperkuat penjelasan teoretis tersebut, karena menunjukkan bahwa rasio efisiensi bukan sekadar indikator teknis keuangan, tetapi merupakan penentu utama kerentanan fiskal pemerintah daerah. Semakin tinggi rasio efisiensi, semakin besar tekanan keuangan yang dihadapi pemerintah daerah, sehingga peluang mengalami financial distress meningkat secara signifikan. Hal ini menegaskan bahwa ketidakmampuan mengelola sumber daya keuangan secara efisien akan memperbesar ketergantungan terhadap pihak eksternal dan melemahkan keberlanjutan keuangan daerah.

Dengan demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Ketergantungan Sumber Daya, yang menekankan bahwa organisasi yang tidak mampu mengelola sumber daya internalnya secara efektif akan menghadapi tingkat ketergantungan dan risiko yang lebih tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa pengendalian rasio efisiensi

melalui pengelolaan belanja dan peningkatan pendapatan daerah merupakan faktor kunci dalam upaya mencegah terjadinya financial distress pada pemerintah daerah.

Menurut penelitian D. N. Sari & Murtanto, (2024) Rasio efisiensi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial distress semakin tinggi rasio efisiensi, semakin besar peluang pemerintah daerah mengalami financial distress. Rasio efisiensi yang tinggi mencerminkan kondisi di mana realisasi belanja lebih besar dibandingkan pendapatan, sehingga pemerintah daerah mengalami keterbatasan ruang fiskal dan meningkatkan ketergantungan pada sumber pendanaan lain. Menurut penelitian Wulandari & Arza, (2020) Rasio efisiensi berpengaruh positif meskipun rasio efisiensi yang tinggi mencerminkan ketidakefisienan pengelolaan belanja daerah, variabel ini belum mampu menjelaskan kondisi financial distress secara langsung karena alokasi belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja operasional dibandingkan belanja modal. Menurut penelitian Pradana & Sarjiyanto, (2023) Rasio efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial distress. Rasio efisiensi yang tinggi menunjukkan ketidakefisienan pengelolaan keuangan daerah, di mana belanja relatif lebih besar dibandingkan pendapatan, sehingga mempersempit ruang fiskal dan meningkatkan kemungkinan pemerintah daerah mengalami financial distress. Menurut penelitian Zakia & Setiawan, (2021) Rasio efisiensi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap financial distress. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun rasio efisiensi yang tinggi mencerminkan ketidakefisienan pengelolaan anggaran, variabel ini belum mampu menjelaskan kondisi financial distress secara langsung karena alokasi belanja daerah masih didominasi belanja operasional. Menurut penelitian Elfiyana & Arza, (2022) Rasio efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial distress. Rasio efisiensi yang tinggi menunjukkan ketidakefisienan pengelolaan keuangan daerah karena belanja relatif lebih besar dibandingkan pendapatan, sehingga mempersempit ruang fiskal dan meningkatkan kemungkinan pemerintah daerah mengalami financial distress.

Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung hipotesis ketiga (H3), yang mengindikasikan bahwa rasio efisiensi berpengaruh signifikan terhadap financial distress pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah periode 2020–2024.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh luas wilayah, populasi penduduk, dan rasio efisiensi terhadap *financial distress* pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah periode 2020–2024, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Luas wilayah berpengaruh terhadap financial distress pemerintah daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas wilayah merupakan faktor struktural yang berperan penting dalam menentukan kondisi keuangan pemerintah daerah. Daerah dengan wilayah yang lebih luas memiliki cakupan pelayanan publik dan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang lebih besar, sehingga menuntut

alokasi anggaran yang tinggi dan berkelanjutan. Apabila kebutuhan tersebut tidak diimbangi dengan kapasitas fiskal dan pengelolaan sumber daya yang memadai, maka pemerintah daerah berpotensi mengalami tekanan keuangan yang mengarah pada kondisi *financial distress*.

Populasi penduduk berpengaruh terhadap financial distress pemerintah daerah

Populasi penduduk terbukti memiliki peran signifikan dalam memengaruhi kondisi *financial distress*. Dalam konteks ini, populasi penduduk dapat dipandang sebagai sumber daya internal yang mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah. Jumlah penduduk yang besar mencerminkan potensi ekonomi dan basis penerimaan daerah yang lebih luas, sehingga pemerintah daerah memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membiayai pengeluaran dan pelayanan publik. Dengan demikian, keberadaan populasi penduduk yang besar dapat menurunkan kerentanan pemerintah daerah terhadap *financial distress* apabila dikelola secara optimal.

Rasio efisiensi berpengaruh terhadap financial distress pemerintah daerah

Rasio efisiensi mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakefisienan dalam pengelolaan belanja dan pendapatan daerah meningkatkan risiko terjadinya *financial distress*. Pemerintah daerah yang tidak mampu mengendalikan belanja sesuai dengan kemampuan pendapatan akan menghadapi tekanan fiskal yang lebih besar, sehingga kondisi keuangan menjadi tidak berkelanjutan dan berpotensi mengganggu penyediaan pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani Tampil, Y., Komalig, H., Langi, Y., Studi Matematika, P., Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, F., & Sam Ratulangi Manado, U. (2017). *Analisis Regresi Logistik Untuk Menentukan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Mahasiswa FMIPA Universitas Sam Ratulangi Manado*.
- Dianti, T. A. (2020). *BAB III*. Universitas Muhammadiyah Gresik.
- Elfiyana, & Arza, F. I. (2022). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Faktor Keuangan terhadap Kondisi Financial Distress di Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 4(2), 2656–3649. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/index>
- Hafid, H., Ahmar, A. S., & Rais, Z. (2023). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Reputasi Auditor terhadap Audit Delay pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2020 Menggunakan Regresi Logistik. *Journal of Statistics and Its Application on Teaching and Research*, 5, 15–22.
- Haraqi, M. S., & Ningsih, E. S. (2017). 6. BAB III.pdf. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2.

- Ismail, D. M., & Adiwibowo, A. S. (2022). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PRAKTIK MANAJEMEN LABA RIIL. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 11(4), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Lailiyah, N. I., & Desitama, F. S. (2024). Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal. *Jurnal Religion Education Social Laa Roiba*, 6, 1952–1973. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i3.5868>
- Nurlaelah, E., Studi Akuntansi, P., & La Tansa Mashiro, S. (2022). Nurlaelah dan Ela/ Pengaruh Kualitas Audit dan Kondisi Keuangan terhadap Opini. *Jurnal Studia Akuntansi Dan Bisnis*, 10, 91.
- Oktaviani, A. A., Barokah, S. N., Salsiyah, M., Bisnis, J. A., & Semarang, N. (2018). THE INFLUENCE OF SERVICE QUALITY ON CUSTOMER'S SATISFACTION AT PT. SINAR MUTIARA CAKRABUANA. In *Jurnal JOBS* (Vol. 4, Issue 2). <https://jurnal.polines.ac.id/index.php/jobs>
- Pradana, I., & Sarjiyanto. (2023). FINANCIAL DISTRESS DITINJAU DARI RASIO KEUANGAN DAN KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 3(5).
- Pranoto, F. C., Hasthoro, H. A., & Nurwiyanta. (2022). Determinan Financial Distress Pemerintah Daerah. *Seminar Nasional Hasil Riset*.
- Rahmi, H. S. L., & Sari, V. F. (2023). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Prediksi Financial Distress pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 1(2), 145–156. <https://doi.org/10.24036/jnka.v1i2.12>
- Sari, D. N., & Murtanto. (2024). PROFIL DAERAH DAN RASIO KEUANGAN TERHADAP FINANCIAL DISTRESS DI PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA. *JURNAL INFORMASI, PERPAJAKAN, AKUNTANSI, DAN KEUANGAN PUBLIK*, 19(2), 243–266. <https://doi.org/10.25105/jipak.v19i2.20485>
- Sari, M., & Arza, F. I. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kondisi Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Se-Indonesia Periode. *Wahana Riset Akuntansi*, 7(1), 1425–1436. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/wra/issue/archive>
- Wahyuni, M. (2020). *STATISTIK DESKRIPTIF UNTUK PENELITIAN OLAH DATA MANUAL DAN SPSS VERSI 25*. Bintang Pustaka Madani.
- Wulandari, Y., & Arza, F. I. (2020). PENGARUH FAKTOR KEUANGAN DAN KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP FINANCIAL DISTRESS (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2015-2018). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2, 3179–3196.
- Zakia, R., & Setiawan, M. A. (2021). 387-Article Text-1128-1-10-20211009.pdf. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3, 653–671.